

# Meniti Keras Lunak Jalan Kebalian

Siang menjelang petang itu saya terjebak macet di seputaran jalan Teuku Umar-Imam Bonjol-Sunset Road. Riuh rendah suara orang dijalanan, sesekali terdengar pekikan dan teriakan. Yang lainnya sambil berlari-lari kecil, sedikit ketakutan. Ada yang hanya menonton, ada pula yang menjauhi kerumunan itu. Esoknya dalam berita berbagai koran mengabarkan kejadian kemarin yang saya alami itu adalah konflik antarormas. Memang, sejak reformasi, ormas di Bali juga tumbuh subur, melanjutkan ormas-ormas sejenis yang sejak 1980an juga telah populer. Momentum politik 1998 yang ditandai moncernya *pecalang*, kran lahirnya ormas di Bali makin deras meluber.

Meski saya tak pernah tahu, dan memang tak ingin tahu visi dan misinya, ormas di Bali keberadaannya makin menguat baik secara politik, dan terutama secara ekonomi. Beberapa di antaranya malah seperti “penguasa” sumber daya ekonomi. Riak-riak konflik akhirnya tak terhindarkan. Belum lagi ketika ormas-ormas ini harus berkompetisi dengan pendatang yang entah bagaimana ceritanya juga sama-sama eksis. Kabar tak sedap, ormas-ormas ini juga ada *bekingnya*. Entahlah. Persepsi publik sudah kadung terbentuk bahwa ormas-ormas itu cenderung tidak lunak.

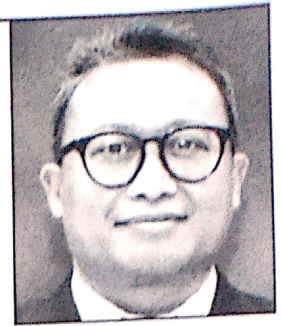


Kini, wajah ormas makin keras, tidak saja kepada orang Bali sendiri, tetapi juga orang luar. “Umpan matang” dengan dalih sebagai orang Bali yang tak boleh terasing dan menjadi penonton di rumahnya sendiri ini akhirnya sering digoreng. Bagi mereka orang luar tak boleh “berkuasa”, tapi sayangnya orang dalam tak ditingkatkan kualitasnya. Sebut saja orang Bali yang sampai saat ini masih ikut transmigrasi padahal di Bali tak sulit mendapatkan pekerjaan. Kalau sudah begini, politik identitas seolah sah dibangun dengan cara kekerasan budaya, kekerasan simbolik, hingga kekerasan fisik.

Upaya mengkapitalisasi modal kultural ala ormas, tam-

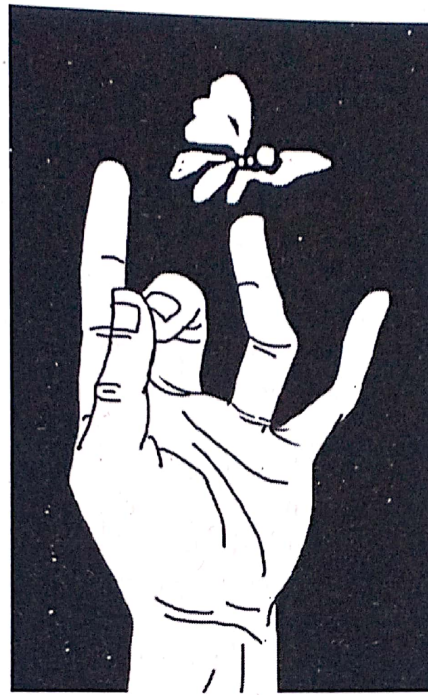
pak dari keinginan mereka untuk mendominasi ruang publik, termasuk dalam urusan perut. Jika jalan-jalan di seputaran Denpasar, kini merembes ke desa-desa, sering terbaca papan nama warung dengan menyebut makanan yang dijualnya haram. Misalnya, warung nasi babi guling “100% haram”, bakso babi “100% haram”. Hal yang sama pada warung soto babi atau sate babi. Fenomena ini adalah satu bentuk keberanian mereka untuk menyuarakan eksklusivitasnya. Mungkin *tagline* itu terkesan ekstrim karena seolah melawan diskursus *mainstream* halal. Sayangnya memang tidak pernah ada “sertifikat haram” untuk melegitimasi wacana ini.

Jika kembali mundur jauh ke belakang, ampas reformasi di awal 2000an telah melapangkan jalan kebebasan, keterbukaan dan kesetaraan, ditambah energi gerakan Ajeg Bali, serta menghambatnya politik identitas, telah menjadi sponsor utama fenomena itu di Bali. Melalui jargon “100% haram”, orang Bali ingin meneguhkan kembali identitas kebalianya. Asal tak kebalasan, misalnya dengan jargon itu, orang Bali lalu dengan *saklek* berdasarkan primordialismenya lalu membuat jarak “aku” dan “kamu”, “kami” dan “kalian” yang mengarah diskriminasi SARA.



Analisis kritis yang dapat diajukan, bisa saja warung “100% haram” adalah strategi kontra *mainstream* dalam perebutan sumber daya. Mereka menjadikan warung sebagai arena bernegosiasi untuk meraih pelanggan dengan segmen yang eksklusif, bahkan bila perlu pembelinya adalah turis asing berduit, sehingga nilai jualnya juga tinggi dan mahal. Warung “100% haram” bisa juga menjadi cara jenaka *meledak* wacana *mainstream* karena yang unik itu selalu menarik perhatian. Jika yang membaca tersenyum dan penasaran, mereka sebetulnya sudah berhasil memengaruhi alam pikir pembacanya.

Dalam pandangan Pierre Bourdieu, *taste of culture* seperti ini biasanya ditentukan oleh yang mayoritas. Dengan standar itu, mayoritas menginginkan yang minoritas mengikutinya. Jika berhasil, mereka (minoritas) akan segera terperangkap untuk didominasi. Begitu kira-kira teori *distinction* yang sering dirujuk pegiat sosial budaya. Jika sudah begitu, biasanya mereka tak puas, lalu memaksakan semua yang tampak menjadi homogen, sama, dan seragam. Homogenisasi akan segera melapangkan jalan hegemonisasi. Bahaya laten yang mungkin diinvestasikan model ini adalah konflik, entah terbuka maupun tersembunyi, entah kini maupun esok.



Jika merefleksikan cara pandang di atas ke dalam kehidupan yang semakin terbuka, kondisi itu memasuki era *sandyakalaning*. Padahal Hindu malah sebaliknya, agama yang membuka peluang lebar perbedaan, tumbuhnya keragaman, kaya warna warni. Hampir semua eksoterisme dibangun di atas taman sari itu. Bahkan tentang Tuhan yang esa saja, Hindu mengajarkan umatnya untuk memuja dengan ragam bentuk (*rupa*) dan sebutan (*nama*). *Ekam sat wiprah bahuda wadanti*.

Spirit terbesar tumbuh, berkembang dan bertahannya Hindu di dunia, terkhusus di nusantara adalah praktik konsisten dari konsep *desa, kala, dan patra*, sebuah narasi pembebasan,

keberpihakan, keterceburan, bahkan pendakian diri. Memikirkan semuanya tampak homogen hanya akan memungguni kejeniusan para leluhur, sekaligus mengingkari keberadaan diri di mana *Panca Maha Bhuta* sebagai pembentuk badan justru disusun berdasarkan unsur dan bahan yang berlian.

Tinimbang memaksakan homogenisasi, lebih baik memikirkan bagaimana konsep *desa, kala, patra* menjadi ideologi umat Hindu di manapun berada. Melalui konsep ini pula mereka melenturkan dirinya dengan apapun dan siapapun, tanpa menanggalkan esoterisme yang mengikat kesatuan mereka sebagai Hindu, misalnya mempertebal keyakinan atas hukum karma, meyakini reinkarnasi, menghayati jalan Tuhan yang berbeda-beda, dlsb. Sebaiknya juga kita membiarkan umat Hindu melakukan perjumpaan budaya dengan kearifan lokal di manapun mereka tumbuh dan berkembang. Percayalah, mereka akan memengaruhi sekitarnya dengan energi positif karena Hindu adalah Sanathana Dharma. Umat Hindu memiliki kemampuan untuk menggarami lahan di mana saja itu ia hidup. Suburlah sekitarnya.

\*Penulis, Antropolog  
UHN IGB Sugriwa Denpasar